

Judul : Saran panja BKSAP, pengaturan AI perlu ikuti perkembangan
Tanggal : Sabtu, 22 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Saran Panja BKSAP Pengaturan AI Perlu Ikuti Perkembangan

FOTO: IG Pribadi



Amelia Anggraini

PANITIA Kerja Artificial Intelligence Badan Kerja Sama Antar Parlemen (Panja AI BKSAP) DPR memetakan sejumlah substansi guna memperkuat tata kelola AI nasional. Kebijakan itu mencakup kerangka hukum mengikat berbasis risiko, penanganan *deepfake*, *voice cloning*, hingga disinformasi. Ini untuk memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat.

Anggota Panja AI BKSAP DPR Amelia Anggraini menjelaskan, kebutuhan Indonesia saat ini tidak berhenti pada hadirnya UU AI semata. Regulasi itu harus dibangun dalam kerangka tata kelola yang jelas, dapat diterapkan, sekaligus mampu mengikuti perkembangan pesat teknologi yang bergerak kian cepat dan dinamis.

Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan membentuk kerangka hukum AI yang bersifat mengikat secara menyeluruh, mengutamakan pendekatan berbasis risiko. Sehingga, aturannya bukan sekadar melarang teknologi, tapi memberi pengaturan sesuai tingkat dampak risiko yang ditimbulkan bagi seluruh pemangku kepentingan secara adil.

Menurutnya, pendekatan itu relevan di tengah perkembangan kemampuan AI. Apalagi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengingatkan bahwa AI berkembang dari penghasil jawaban

jadi sistem perencana hingga eksekutor. "Makanya butuh tata kelola yang mengimbangi kecepatan inovasi serta menjamin akuntabilitas pemanfaatannya," terangnya, Kamis (20/8/2026).

Amelia menyoroti penyalahgunaan AI melalui teknologi *deepfake* dan *voice cloning*. Deepfake bahkan disalahgunakan untuk memanipulasi visual maupun audio yang makin sulit dikenali masyarakat. Makanya, bersama dengan ancaman disinformasi, kedua teknologi itu perlu jadi prioritas utama dalam pembentukan tata kelola AI nasional.

Selanjutnya, seiring dengan kian meningkatnya penggunaan AI di masyarakat, kata Amelia, perlindungan dan keamanan data pribadi perlu diperkuat. Ini karena data memegang peran utama dalam proses pelatihan serta pengembangan sistem AI. Sebab itu, hak pengguna harus jadi bagian dari kerangka perlindungan hukum nasional.

Dia mengingatkan, tata kelola AI tidak cukup sekadar menghasilkan aturan teknis semata. Indonesia harus membangun kapasitas kelembagaan dan mekanisme pengawasan agar regulasi berjalan efektif. "Kerangka hukum kuat dibutuhkan karena pedoman etika yang ada belum bersifat mengikat layaknya UU," terang legislator Fraksi NasDem itu.

Senada, Ketua Panja AI BKSAP DPR Bramantyo Suwondo menegaskan, pesatnya perkembangan AI harus diimbangi regulasi yang sejalan dengan kepentingan nasional. Negara perlu memastikan keamanan sekaligus mempertahankan kendali penuh atas data nasional. Terlebih di tengah kian luasnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan itu.

Dia bilang, isu kedaulatan data jadi semakin strategis mengingat teknologi AI sangat bergantung pada ketersediaan dan pengolahan data. ■ PYB